

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. 2018. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press.
- Hamzah, Jur. Andi. 2007. *Pemberantasan korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.

- Marwan, Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yanuar, Purwaning. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT. Alumni
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung
- Muzila, Lindy et.all. 2012. *On the Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*. Washington DC: World Bank & UNODC.
- Nawawi Arief, Barda. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- O.C. Kaligis. 2015. *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No.30 Tahun 2014)*. Bandung: PT Alumni.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. 2015. *Penulisan Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Surabaya: Citra Aditya.
- Pradjonggo, Tjandra. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Pujiyono. 2017. *Tindak Pidana Korupsi*. Tangerang: Universitas Terbuka-Kementrian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jember: Raja Grafindo Persada.

Suratman dan H.Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun. 2019. *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*. Komisi Pemberantasan Korupsi

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap. MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1454 K/PID.SUS/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/PID.SUS/2013

United Nations Convention Against Corruption, 2003

Inter-American Convention Against Corruption

African Union Convention on The Prevention and Combating Corruption

C. Jurnal

- Alvon Kurnia Palma *et.all.* 2014. *“Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia”*. Jakarta: Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch.
- Jeffrey R. Boles, *“Criminalizing the Problem of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses and Human Rights Violation”*, NYU Jurnal of Legislation and Public Policy, 852 (2014)
- Luthan, Salman. *“Asas dan Kriteria Kriminalisasi”*, Jurnal Hukum Januari 2019: 1-17
- Susanti, Laras. *“Criminal Liability Of Public Officials For Illicit Enrichment: Comparing Approaches Of The Use Of Indirect Methods Of Proof In Investigating Illicit Enrichment In Indonesia And The U.S”*, Jurnal Hukum Internasional: Volume 13 Number 1 October 2015
- Suyatmiko, Wawan dan Alvin Nicola, *“Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019”*, (Transparency International)
- A.A Mirah Endraswari, *“Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan Illicit Enrichment Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia”*, Udayana Master Law Journal, Vol. 5, No.2: 239-450, Juli 2016

D. Wawancara

- Prof. Barda Nawawi Arief, S.H, Wawancara, Akademisi di Bidang Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, 8 Februari 2020)

Indra Gunawan dan Naila Fauzana Nasution, *Wawancara*, Komisi Pemberantasan Korupsi, (Jakarta, 20 Februari 2020)

E. Internet

www.transparency.org,

Dylan Aprialdo Rachman, "ICW: Kerugian negara akibat korupsi pada 2018

capai Rp 9,29 Triliun." Kompas, 28 April 2019, halaman I, dalam

website [https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-](https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all)

[kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-](https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all)

[triliun?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all),

<http://lipi.go.id/berita/fenomena-gayus-tambunan-/5284>,

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/55-djoko-susilo>,

[https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi)

[instansi](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi),

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/statistik-lhkpn>,

[https://antikorupsi.org/id/news/miskinkan-koruptor-lewat-aturan-illicit-](https://antikorupsi.org/id/news/miskinkan-koruptor-lewat-aturan-illicit-enrichment)

[enrichment](https://antikorupsi.org/id/news/miskinkan-koruptor-lewat-aturan-illicit-enrichment),